



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ~~44~~ TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PARAF KOORDINASI

z f a

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1877);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 108);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI

R I Ad

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 441) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 445);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2021-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 445), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tetap.
 2. Tetap.
 3. Tetap.
 4. Tetap.
 5. Tetap.
 6. Tetap.
 7. Tetap.
 8. Tetap.
 9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025.
2. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Birokrasi Kabupaten Konawe dan Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025;
 - c. Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe.
 - d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Konawe.
 - e. Penutup.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

J + W

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal 7 NOVEMBER 2023



Pj. BUPATI KONAWE,

H. HARMAN RAMBA

Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal 7 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KONAWE



FERDINAND

NO		
1	sekda	✓
2	ASISTEN III	✓
3	KABAG LUKUM	✓
4	Kabag ORPES	✓
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR : 644

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar table	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan Penajaman Road map RB.....	2
1.3 Isu Strategis RB Tahun 2020-2024	3
BAB II GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN KONAWE DAN FOKUS PENAJAMAN ROAD MAP RB TAHUN 2020-2024	12
2.1 Gambaran Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe.....	12
2.2 Tujuan RB	13
2.3 Sasaran Strategi RB	13
2.4 Penajaman Terhadap Kegiatan utama	14
2.5 Penajaman Terhadap Fokus Pelaksanaan RB	14
2.6 Gap Analisis Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe Terkait dengan Target RB Nasional Setelah Penajaman	15
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KONAWE	19
3.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe ..	19
3.2 Perencanaan RB General	20
3.3 Penetapan Tema dan Target Utama RB Tematik	24
BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KONAWE	35
4.1 Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe	35
4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaliasi RB.....	40
BAB V PENUTUP	41

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan Capaian Komponen Pengungkit.....	12
Tabel 2.	Gap Kinerja Tujuan dan Sasaran.....	15
Tabel 3.	Gap Analisis Kegiatan Utama dan Indikator.....	16
Tabel 4.	Target Capaian Indikator Tujuan Road Map RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 5.	Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General.....	20
Tabel 6.	10 (sepuluh) Skala Prioritas Kegiatan Utama RB General Kabupaten Konawe Tahun 2023-2024.....	22
Tabel 6.	Target Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General.....	23
Tabel 7.	Tema dan Target Utama RB Tematik.....	24
Tabel 8.	Identifikasi Masalah Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Model 7s McKinsey.....	25
Tabel 9.	Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Penanggulangan Kemiskinan.....	25
Tabel 10.	Identifikasi Masalah Peningkatan Investasi Berdasarkan Model 7s McKinsey.....	26
Tabel 11.	Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Peningkatan Investasi.....	27
Tabel 12.	Identifikasi Masalah Pengendalian Inflasi Berdasarkan Model 7s McKinsey.....	27
Tabel 13.	Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Pengendalian Inflasi.....	28
Tabel 14.	Identifikasi Masalah Penanganan Stunting Berdasarkan Model 7s McKinsey.....	28
Tabel 15.	Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Penanganan Stunting.....	28
Tabel 16.	Identifikasi Masalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Model 7s McKinsey.....	29
Tabel 17.	Penetapan Skoring Tertinggi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	29

PARAF KOORDINASI

y t ad

BAB I PENDAHULUAN

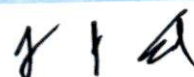
1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Sehingga dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dengan mengacu pada *Road map* Reformasi Birokrasi Nasional, Kabupaten Konawe telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, hasil yang ditunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB Kabupaten Konawe 2020-2024 belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang baik ini dapat dilihat dari berbagai indikator-indikator pengungkit yang masih berada pada level yang sangat rendah. Pada sisi

PARAF KOORDINASI



pelaksanaannya, pengelolaan RB di level OPD belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing OPD sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Kabupaten Konawe 2020-2024.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Konawe mencoba melakukan adaptasi terhadap perubahan regulasi tersebut dengan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai arah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Diharapkan dengan adanya sinkornisasi penajaman arah RB ini, mampu merubah orientasi pelaksanaan RB selama ini yang hanya berfokus pada pemenuhan tanpa melihat dampak atau hasil yang ditimbulkan bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun bagi masyarakat.

1.2 Tujuan Penajaman Road Map RB

Pada hakikatnya, *Road Map* RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Kabupaten Konawe Tahun 2020–2024 dengan tujuan, yaitu:

1. Ikut serta mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB Nasional

Penajaman *Road Map* RB 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di kementerian/lembaga, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing kementerian/lembaga, selain itu *Road Map* RB 2020-2024 sebelum

PARAF KOORDINASI

V + A

penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

2. Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang *disruptif*, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendukung *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan khususnya dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

Penajaman Road Map RB 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2020–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional. Demikian pula halnya di Kabupaten Konawe pada *Road Map* RB 2020-2024 akan dilakukan pemetaan mengenai peran masing-masing OPD dalam mendukung pencapaian RB yang lebih berdampak.

1.3 Isu Strategis RB Tahun 2020–2024

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun

PARAF KOORDINASI
f i a

2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.


1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu-isu yang mengemuka terkait implementasi *Road Map* RB di Kabupaten Konawe pada dasarnya relevan dengan isu-isu ditingkat hulu yang dikemukakan didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Namun demikian selain isu umum tersebut terdapat isu-isu tingkat hulu yang mengemuka berdasarkan kondisi eksisting didalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe. Beberapa isu tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman terhadap konsep dan implementasi RB yang masih terbatas

Salah satu kendala utama yang dihadapi didalam pelaksanaan *Road Map* RB di Kabupaten Konawe yakni pemahaman terhadap konsep RB dan bagaimana mengimplementasikannya masih sangat kurang atau terbatas. Kondisi ini terjadi pada hampir seluruh tingkatan pemangku kepentingan sehingga akhirnya berdampak pada rendahnya komitmen dari stakeholder untuk melaksanakan agenda-agenda yang telah ditetapkan didalam dokumen *Road Map* RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024. Kurangnya koordinasi antar instansi berwenang selama ini menjadi penghambat tersosialisasikannya konsep RB secara lebih luas. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tidak/belum ditindaklanjuti untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan RB selanjutnya. Idealnya rekomendasi yang ada harusnya dijadikan sebagai bahan koordinasi antar OPD untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan RB. Dengan diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 merupakan momentum yang sangat tepat untuk membangun koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga *Road Map* RB bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

- b) *Road Map* RB yang disusun tidak relevan dengan kondisi di Kabupaten Konawe

PARAF KOORDINASI


Terlepas dari diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, faktanya perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman kembali atas *Road Map* RB yang telah disusun. Mengingat dokumen *Road Map* RB yang disusun sebelumnya belum menggambarkan secara konkrit peran dari berbagai stakeholder. Tidak adanya relevansi dokumen *Road Map* RB terhadap program dan kegiatan yang akan dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kendala yang sangat sulit dalam melaksanakan RB dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe. Dokumen yang ada hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif dan belum disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Semestinya harmonisasi *Road Map* RB dan Rencana Kerja (Renja) OPD perlu dilakukan sehingga isu dan permasalahan pelaksanaan RB dapat ditindaklanjuti didalam dokumen perencanaan OPD. Dengan demikian *Road Map* RB relevan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh OPD dan tidak hanya sekedar menjadi dokumen administratif.

- c) Agenda-agenda RB tidak/belum terinternalisasi kedalam perencanaan dan penganggaran daerah

Akibat tidak berlangsungnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan agenda-agenda *Road Map* RB yang telah disusun, menimbulkan keadaan *stagnan* dalam pelaksanaan RB. Tidak ada perkembangan yang signifikan, bahkan kecenderungannya mengalami fluktuasi pada level rendah. Agenda RB yang telah disusun berjalan secara parsial pada tataran rencana tim RB yang tidak/gagal diinternalisasikan kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD. Internalisasi agenda RB kedalam dokumen perencanaan hingga dokumen penganggaran daerah merupakan keniscayaan bagi terlaksananya seluruh agenda RB yang disepakati oleh para pemangku kepentingan. Atau dengan kata lain jika terjalin kolaborasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan maka agenda RB akan lebih mudah dilaksanakan.

- d) Komitmen stakeholder yang masih rendah

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan RB yakni masih rendahnya komitmen pemangku kepentingan. Penyebab hal ini karena agenda RB yang memuat tujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, lincah dan adaptif belum tersampaikan dengan baik. Maka untuk mulai membangun komitmen para pemangku kepentingan, secara intensif konsep RB sebagai *tools* dalam

PARAF KOORDINASI
A r w

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan perlu terus masifkan koordinasinya. Pemerintah Kabupaten Konawe perlu membentuk *rool model* pelaksanaan RB baik ditingkat organisasi maupun pada tingkat individu. Mendorong implementasi RB memang perlu dilakukan secara bertahap dan sistematis sehingga akan benar-benar memberikan dampak bagi organisasi.

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

e) Birokrasi yang Belum Kolaboratif


Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

f) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

g) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.

PARAF KOORDINASI


Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

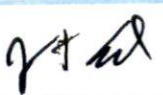
- h) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- i) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

Budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU)

PARAF KOORDINASI



Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Berkaitan dengan agenda pembangunan nasional yang menjadi fokus pemerintah seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga telah diinternalisasikan kedalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Konawe dan telah menjadi hal yang prioritas penanganannya. Namun dalam perkembangannya beberapa dari prioritas tersebut masih belum menunjukkan perkembangan yang baik, diantaranya yakni usaha penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan penggunaan produk dalam negeri termasuk pengendalian inflasi yang kinerjanya masih bisa dimaksimalkan.

Persoalan yang terjadi ditingkat hilir sangat berkaitan erat dengan isu yang mengemuka ditingkat hulu yakni lemahnya komitmen oleh stakeholder yang memiliki kewenangan langsung dan tidak berjalannya skenario sistem yang benar. Usaha-usaha untuk melakukan intervensi terhadap agenda pembangunan nasional (penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan pengendalian inflasi) belum benar-benar dilaksanakan secara sistematis sehingga dampaknya pun tidak nampak secara menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran kemiskinan di Kabupaten Konawe masih berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yakni pada tahun 2022 sebesar 12,57%. Demikian juga dengan

PARAF KOORDINASI 8

usaha penurunan stunting yang masih menunjukkan hasil yang belum maksimal dimana pada tahun 2022 angka stunting mengalami peningkatan 28,1% dari sebelumnya tahun 2021 sebesar 26,2%. Sedangkan dari sisi penanganan inflasi diperlukan koordinasi yang lebih intensif antar stakeholder agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik dan berkelanjutan.

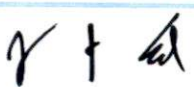
Berkaitan dengan hal diatas, isu-isu strategis ditingkat hilir yang mengemuka diantaranya:

a) Lemahnya sistem data sosial masyarakat

Ketersediaan data yang baik menjadi salah satu jaminan keberhasilan terlaksananya suatu program. Didalam program-program pemerintah seperti usaha penurunan kemiskinan, penurunan stunting dan pengendalian inflasi akurasi data menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Konawe sebenarnya telah mulai membangun sistem satu data. Kertas kerja pengendalian data sosial masyarakat terutama terkait dengan data kemiskinan dan data stunting sudah dirancang, namun dalam perjalanannya komitmen membangun satu data tersebut belum diteruskan dan berjalan sebagaimana mestinya. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan melibatkan BPS Kabupaten Konawe perlu kembali didorong untuk menuntaskan persoalan data. Sehingga dapat tercipta satu data yang disepakati oleh seluruh stakeholder untuk dijadikan sebagai dasar intervensi program dan kegiatan ke masyarakat penerima manfaat sehingga kebijakan yang dilakukan tepat sasaran.

b) Integrasi kebijakan hulu-hilir belum terkoordinasi dengan baik

Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe melalui intervensi program dan kegiatan pada OPD yang mengampuh sebenarnya sudah cukup masif. Namun dalam prakteknya kebijakan ini belum diikuti dan terintegrasi dengan kebijakan ditingkat hilir (desa/kelurahan). Konkritnya yang terjadi, bahwa program dan kegiatan ditingkat OPD belum sejalan atau terintegrasi dengan kebijakan ditingkat desa/kelurahan. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab idealnya pelaksanaan program-program sosial kemasyarakatan harus dilaksanakan secara kolaboratif dari tingkat hulu sampai hilir. Tentunya program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, penurunan

PARAF KOORDINASI


stunting dan pengendalian inflasi sasarannya adalah masyarakat yang berada di wilayah desa dan kelurahan maka sangat perlu kebijakannya diintegrasikan dengan kebijakan yang ada di desa dan kelurahan sebab desa dan kelurahan juga memiliki sumber daya anggaran dalam usaha-usaha tersebut.

- c) Belum adanya koordinasi antara OPD dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Isu lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hal utama yang mengemuka dalam penanganan isu-isu nasional yang ada. Setidaknya ini tercermin sejak Pemerintah Pusat memberikan penekanan untuk penyelesaian persoalan tersebut kepada seluruh Pemerintah Daerah. Informasi mengenai isu nasional penanganan kemiskinan, penurunan stunting dan pengendalian inflasi telah tersampaikan kepada seluruh lapisan pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Desa dan Kelurahan. Sehingga semestinya seluruh pemangku kepentingan dapat sejalan dalam berbagai upaya pelaksanaan program-program yang ada. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi dalam skala kelembagaan yang lebih luas dan terstruktur memang belum dilaksanakan. Ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh struktur elemen kelembagaan pemerintah dari tingkat OPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Kelurahan harus mengetahui secara bersama-sama mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dilakukan dan peran serta intervensi dari masing-masing stakeholder seperti apa.

Sejak bergulirnya instruksi Pemerintah Pusat tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe memang belum melakukan rapat koordinasi dalam skala besar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari OPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Penyatuan dari seluruh tingkatan kelembagaan daerah dalam satu forum penting untuk dilaksanakan untuk menciptakan semangat dan komitmen yang sama dalam pengentasan berbagai isu-isu nasional yang mengemuka khususnya penanganan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

- d) Belum terdapatnya *Logical Frame Work* (kerangka kerja logis) dalam penan

PARAF KOORDINASI
y t a

Logical Frame Work (kerangka kerja logis) dalam pelaksanaan sebuah kebijakan penting untuk dibuat agar masing-masing pemangku kepentingan memiliki sasaran, strategi, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Ini juga penting untuk memastikan setiap pemangku kepentingan menjalankan tanggungjawabnya dengan target dan *range* waktu yang sudah ditetapkan, sehingga dengan demikian lebih mudah untuk melakukan evaluasi atas target masing-masing pemangku kepentingan. Dengan adanya *Logical Frame Work* pelaksanaan kebijakan lebih terstruktur dan memungkinkan seluruh perangkat mulai dari tingkat atas sampai kebawah dapat bekerja lebih maksimal.

Dengan memperhatikan tujuan penajaman Roadmap dan berbagai isu strategis baik ditingkat hulu maupun hilir seperti yang tercantum diatas, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Untuk menindaklanjutinya maka *Road Map* RB Kabupaten Konawe perlu dilakukan penyesuaian sehingga sejalan dengan tujuan *Roadmap* RB penajaman serta turut memperhatikan berbagai isu strategis di tingkat hulu maupun hilir.

PARAF KOORDINASI

g t a

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN KONAWE DAN FOKUS
PENAJAMAN ROAD MAP RB TAHUN 2020-2024

2.1 Gambaran Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe


Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe masih perlu mendapat perhatian serius, mengingat berdasarkan hasil evaluasi RB yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang masih cukup lambat. Secara kumulatif nilai Indeks RB pada tahun 2022 baru mencapai angka 45,91. Kondisi ini merupakan gambaran bahwa komponen-komponen indikator didalam RB capaiannya masih cukup rendah (lihat pada tabel 1). Menyadari hal ini maka Pemerintah Kabupaten Konawe berusaha melakukan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tabel 1. Perkembangan Capaian Komponen Pengungkit

No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1	ASN Profesional	0-100	27,86	28,49	BKN
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	-	1,73	Kementerian PANRB
3	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	0-100	0,00	25,5	LKPP
4	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,61	2,92	Kementerian PANRB
5	Kapabilitas APIP	0-5	2	2	BPKP
6	Maturitas SPIP	0-5	1	3	BPKP
7	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	40,09	55,60	ORI
8	Kualitas Pengelolaan Kearsipan	0-100	13,72	8,23	ANRI

Adapun fokus penajaman *Road Map* Kabupaten Konawe Tahun 2023-2026 juga sejalan dan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dimana didalam RPD Kabupaten Konawe Tahun 2024-2026 telah memuat 5 (lima) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yakni :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Penguatan reformasi birokrasi untuk pelayanan public yang berkualitas;
3. Pemerataan pembangunan infstruktur wilayah;

PARAF KOORDINASI


4. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
5. Mewujudkan Konawe yang layak huni dari aspek lingkungan;

Semangat melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe dapat terlihat dari penetapan prioritas daerah diatas. Sehingga diharapkan kelemahan-kelemahan pelaksanaan RB selama ini dapat diselesaikan.

2.2 Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya

2.3 Sasaran Strategis RB

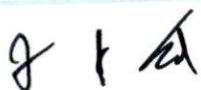
Dalam pelaksanaannya Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan nasional, sebagaimana arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi. Pada *Road Map RB 2020-2024* setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu sebagai berikut :

1. **Aspek hard element** adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan.

Adapun sasaran strategis dari *hard element* adalah terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis

2. **Aspek soft element** berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

PARAF KOORDINASI



Adapun sasaran strategis dari *soft element* adalah terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

2.4 Penajaman Terhadap Kegiatan Utama

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan- kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

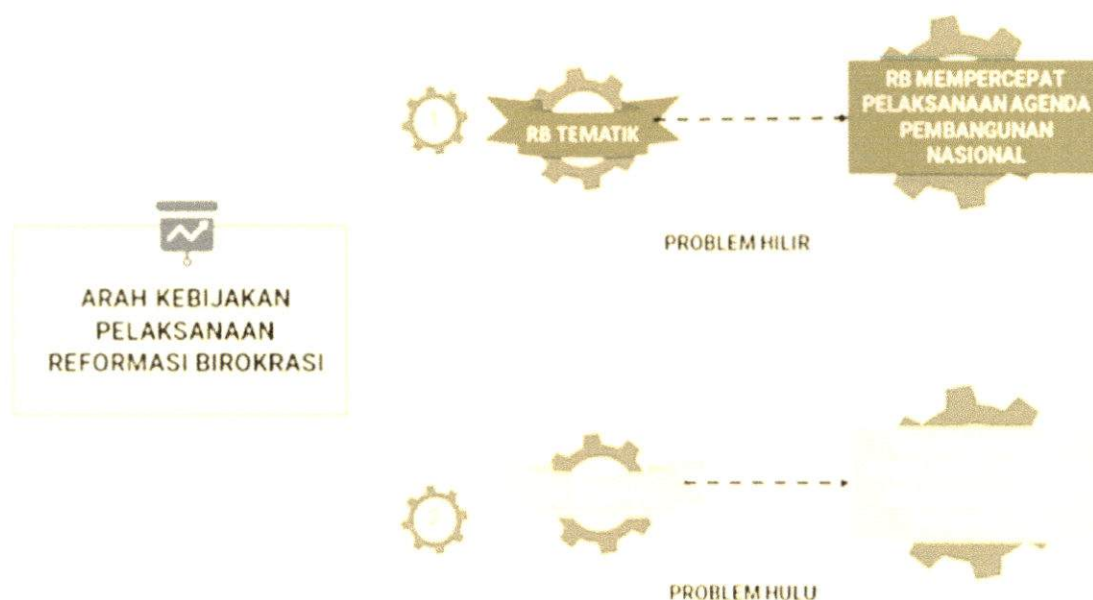
2.5 Penajaman Terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

PARAF KOORDINASI



Gambar 1. Arah Kebijakan Pelaksanaan RB



2.6 Gap Analisis Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe dengan Target RB Nasional Setelah Penajaman

Adapun Gap analisis antara kondisi *Eksisting* di Kabupaten Konawe dengan Target *Road Map* Nasional tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Gap Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan	Baseline Nasional (Tahun 2021)	Target RPD 2024	Baseline Kabupaten Konawe (Tahun 2022)
1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota Minimal Baik	65	45,91 (Kurang)
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan 9,71%	9,65	Angka Kemiskinan 12,57%
		Pertumbuhan Investasi 9%	-	Pertumbuhan Investasi 30%
1.1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	23,58% Kab/Kota Baik	3,5	1,73 (Kurang)
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	66,73% Baik	72,5	63,92 (Baik)
	Capaian Akuntabilitas Keuangan	91,91% WTP	WTP	WTP
1.2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survey <i>Employer Branding</i>	6,90% (2022)	-	-
	Nilai Survey Indeks Ber-AKHLAK	60,9 (2022)	-	-

PARAF KOORDINASI
g + sd

	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai rata-rata Kab/Kota 71,4%	-	82,87
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata Kab/Kota 74,89%	-	86,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian nilai RB Kabupaten Konawe terhadap kondisi eksisting RB Nasional pada level tujuan masih cukup rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator capaian Indeks RB dimana Kabupaten Konawe masih berada pada level kurang. Demikian pula dari sisi capaian persentase angka kemiskinan di Kabupaten Konawe yang masih berada diatas rata-rata nasional. Sedangkan untuk capaian pertumbuhan investasi sudah cukup baik. Sementara dilevel indikator capaian sasaran dapat dilihat Indeks SPBE masih berada pada level kurang. Untuk indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan, Nilai Survey Penilaian Integritas dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat mendapat nilai yang sudah cukup baik.

Berdasarkan penajaman *Road Map* RB Nasional telah dilakukan penyederhanaan kegiatan utama menjadi 21 (dua puluh satu) kegiatan utama yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) indikator yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran RB Kabupaten Konawe tahun 2020-2024. Sehingga perlu diketahui perkembangan capaian ke-21 kegiatan utama yang terdiri dari 28 indikator yang ada.

Tabel 3. *Gap Analisis Kegiatan Utama dan Indikator*

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Roadmap RB Nasional 2024	Kondisi Eksisting Kabupaten Konawe (Tahun 2022)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Baik	-
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Baik	-
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Baik	3,5

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Roadmap RB Nasional 2024	Kondisi Eksisting Kabupaten Konawe (Tahun 2022)
1	2	3	5
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Baik	-
4. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Baik	3
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	-	-
6. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	100% predikat ZI	-
7. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Baik	-
	Nilai SAKIP	Baik	63,92
8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Baik	-
9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	-	82,87
10. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-
11. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	-
12. Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Baik	8,23
13. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Baik	-
14. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik	25,5
15. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Baik	-
16. Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Baik	-
17. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Baik	-
18. Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Baik	-
19. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem merit	Baik	-

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Roadmap RB Nasional 2024	Kondisi Eksisting Kabupaten Konawe (Tahun 2022)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
20. Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Baik	28,49
	Indeks NSPK	Baik	-
21. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	-
	Indeks Pelayanan Publik	Baik	2,92

Dapat dilihat bahwa beberapa target indikator tahun 2024 telah dapat dicapai oleh Kabupaten Konawe. Beberapa indikator lainnya belum memiliki nilai, dikarenakan indikator tersebut merupakan nilai yang baru di luncurkan dan instansi *leading sector* belum melakukan evaluasi ke Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KONAWE

3.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe

Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas ASN, penciptaan Lembaga yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan transformasi digital. Sehingga tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 Kabupaten Konawe setelah penajaman adalah **“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”**.

Target capaian indikator tujuan *Road Map* RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Capaian Indikator Tujuan *Road Map* RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline Kabupaten Konawe (Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	45,91 (Kurang)	55	65
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan 12,57%	12,00%	9,65%
		Pertumbuhan Investasi 30%	35%	50%

Sasaran Kabupaten Konawe berdasarkan Tujuan RB Nasional terdiri dari dua sasaran yaitu sasaran RB general dan RB tematik. RB general terdapat dua aspek yaitu, aspek *hard element* dengan sasaran “terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif” dan aspek *soft element* dengan sasaran “terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional”.

Sedangkan sasaran RB tematik mengambil tema-tema yang sudah ditetapkan oleh *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu menangani isu-isu pembangunan yang meliputi menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, digitalisasi pemerintah dalam menurunkan stunting, peningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan menjaga inflasi.

PARAF KOORDINASI



3.2 Perencanaan RB General

1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama RB General

Dalam penetapan prioritas kegiatan utama merujuk pada arah penajaman *Road Map* RB 2020-2024 yang membagi kedalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Selanjutnya akan dilakukan analisis skala prioritas untuk intervensi kedua fokus tersebut dan analisis terhadap unit kerja atau OPD pelaksana setiap kegiatan utama yang ditetapkan.

Seluruh kegiatan utama merupakan kegiatan mandatory yang harus dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan kewenangannya. Namun dalam hal instansi mengalami keterbatasan sumber daya, maka perlu melakukan identifikasi tingkat prioritas terhadap seluruh kegiatan utama, agar kegiatan utama dengan prioritas tinggi untuk dilaksanakan lebih awal dan kegiatan utama dengan prioritas rendah untuk dilaksanakan setelahnya, namun seluruh kegiatan utama harus dilaksanakan. Analisis Skala Prioritas tercantum pada *table* berikut ini :

Tabel 5. Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	2	3	4	5	6
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	10	6	8	24
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhaan Birokrasi	10	5	7	22
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	10	10	9	29
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE				
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	10	4	7	21
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi Layanan Digital	10	8	9	27
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	10	5	6	21

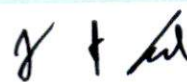
PARAF KOORDINASI

J + M

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	2	3	4	5	6
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	10	4	7	21
	Indeks Perencanaan Pembangunan				
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	10	7	8	25
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	6	7	23
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	10	4	5	19
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	10	4	5	19
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	10	8	9	27
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	10	5	8	23
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	10	7	8	25
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	10	6	8	24
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK				
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	10	6	8	24
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	10	7	8	25
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	10	6	8	24
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem merit	10	7	8	25
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Profesionalitas ASN	10	6	6	22
	Indeks NSPK				
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	10	7	7	24
	Indeks Pelayanan Publik				

Berdasarkan hasil identifikasi skala prioritas kegiatan utama RB General diperoleh hasil skoring yang tersaji dalam tabel 5 diatas.

PARAF KOORDINASI



Mempertimbangkan target waktu pencapaian RB Nasional yang berakhir tahun 2024 dan kesiapan sumber daya yang dimiliki maka Pemerintah Kabupaten memilih 10 (sepuluh) skoring tertinggi dari 21 kegiatan utama yang ada. 10 (sepuluh) kegiatan utama yang akan diintervensi dalam rencana aksi RB General adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 10 (sepuluh) Skala Prioritas Kegiatan Utama RB General Kabupaten Konawe Tahun 2023-2024

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	2	3	4	5	6
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	10	10	9	29
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE				
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi Layanan Digital	10	8	9	27
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	10	8	9	27
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Profesionalitas ASN	10	9	7	26
	Indeks NSPK				
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	10	7	8	25
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	10	7	8	25
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	10	6	8	24
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	10	7	8	25
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem merit	10	7	8	25
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat	10	7	7	24
	Indeks Pelayanan Publik				

2. Penetapan Target Kegiatan Utama RB General

Berdasarkan tabel diatas, target kegiatan utama dengan total skor yang besar akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan lebih awal. Sehingga diperoleh Target Kegiatan Utama RB General Kabupaten Konawe sebagaimana pada tabel dibawah ini:

PARAF KOORDINASI

Y T sd

Tabel 6. Target Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline RB Kabupaten Konawe	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,73	3,5	4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua OPD
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	-	75	75	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua OPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	-	Baik	1 MPP	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal	OPD Pelayanan
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip (mungkin datanya tertukar, harusnya 8,23 ini yg kualitas pengelolaan arsip)	-	25	75	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Semua OPD
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Terdapat baseline data terakhir pada tahun 2022 dengan nilai 28,49)	-	Baik	50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua OPD
	Indeks NSPK	-	Baik	50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua OPD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	-	50	80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua OPD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	25,5	40	70	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua OPD
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	-	75	90	Bagian Organisasi	Semua OPD
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	-	50	75	Bagian Organisasi	Semua OPD
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem merit	-	200	250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua OPD
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	75	80	Bagian Organisasi	Semua OPD

PARAF KOORDINASI

y t m

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline RB Kabupaten Konawe	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	2,92	3	4	Bagian Organisasi	Semua OPD

3.3 Penetapan Tema dan Target Utama RB Tematik


Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten Konawe. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Konawe difokuskan pada: 1. Penanggulangan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Pengendalian Inflasi; 4. Digitalisasi Pemerintahan; 5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Konawe memilih untuk melaksanakan intervensi terhadap ke-5 kegiatan utama RB tematik mengingat secara keseluruhan sangat perlu untuk diimplementasikan didaerah karena capaiannya yang masih cukup rendah.

Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Konawe terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Tema dan Target Utama RB Tematik

No.	Tema	Sasaran tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target tahunan		Leading Sector
					2023	2024	
1	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	12,57%	12%	11%	Bappeda (TKPKD)
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Invenstasi	15 T Rupiah	20 T Rupiah	25 T Rupiah	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
3	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya inflasi	Tingkat Inflasi	-	2-3%	2-3%	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
4	Penurunan Stunting	Menurunnya tingkay prevalensi stunting	Prevalensi Stunting	28,10%	20%	14%	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%	75%	100%	Dinas Koperindag (Tim P3DN)

PARAF KOORDINASI



Berdasarkan tema diatas selanjutnya dilakukan identifikasi masalah pada setiap tema yang dipilih. Dalam perumusan identifikasi masalah dilakukan dengan Model 7s Mc Kinsey. Masing-masing permasalahan yang mengemuka berdasarkan hasil identifikasi yakni sebagai berikut

1. Penanggulangan kemiskinan

Tabel 8. Identifikasi Masalah Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Model 7s McKinsey

Elemen Utama	Elemen Turunan	Identifikasi Masalah
1	2	3
Hard elements	Strategi	Belum dilakukan secara sinergis
		Belum adanya inovasi program pengentasan kemiskinan
	Struktur	Belum adanya koordinasi antara OPD dan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan
		Belum adanya struktur kerangka kerja logis
	Sistem	Lemahnya sistem data sosial masyarakat
		Integrasi kebijakan program hulu-hilir belum terkoodinasi dengan baik
		Program tidak tepat sasaran
Soft elements	Skill	Kapasitas terbatas
	Staff	Masih belum fokus terhadap isu
		Kualifikasi terbatas
	Style (gaya kepemimpinan)	Pendelegasian kewenangan belum berjalan maksimal
Shared Value (nilai organisasi)		-

Tabel 9. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Penanggulangan Kemiskinan

No.	Masalah/Faktor penyebab	Banyak/. sering terjadi	Dapat diintervensi	Biaya rendah	Skala Potensi
1	2	3	4	5	6
1	Belum dilakukan secara sinergis	8	9	6	23
2	Belum adanya inovasi program pengentasan kemiskinan	8	9	9	26
3	Belum adanya koordinasi antara OPD dan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan	9	9	6	24
4	Belum adanya struktur kerangka kerja logis	8	9	5	22
5	Lemahnya sistem data sosial masyarakat	9	9	7	25

PARAF KOORDINASI

Y t Lu

No.	Masalah/Faktor penyebab	Banyak/. sering terjadi	Dapat diintervensi	Biaya rendah	Skala Potensi
1	2	3	4	5	6
6	Integrasi kebijakan program hulu-hilir belum terkoordinasi dengan baik	8	9	8	25
7	Program tidak tepat sasaran	7	7	6	20
8	Kapasitas terbatas	7	8	6	21
9	Masih belum fokus terhadap isu	8	8	5	21
10	Kualifikasi terbatas	7	8	6	21
11	Pendelegasian kewenangan belum berjalan maksimal	8	8	6	22

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas diambil 6 (enam) bobot tertinggi. Berdasarkan pembobotan tertinggi disusun logical frame work (terlampir) dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi.

2. Peningkatan Investasi

Tabel 10. Identifikasi Masalah Peningkatan Investasi Berdasarkan Model 7s McKinsey

Elemen Utama	Elemen Turunan	Identifikasi Masalah
1	2	3
Hard elements	Strategi	Promosi potensi daerah masih konvensional
		Belum adanya informasi peta wilayah potensi investasi
	Struktur	Struktur pengelolaan MPP
	Sistem	Kepatuhan jam kerja
Delay proses pelayanan masih cukup tinggi		
Soft elements	Skill	Kapasitas SDM terbatas
	Staff	Kurangnya komitmen
		Kurangnya integritas
	Style (gaya kepemimpinan)	-
Shared Value (nilai organisasi)	-	

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

Tabel 11. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Peningkatan Investasi

No.	Masalah/Faktor penyebab	Banyak/ sering terjadi	Dapat diintervensi	Biaya rendah	Skala Potensi
1	2	3	4	5	6
1	Promosi potensi daerah masih konvensional	8	8	8	24
2	Belum adanya informasi peta wilayah potensi investasi	9	9	8	26
3	Struktur pengelolaan MPP	8	7	6	21
4	Kepatuhan jam kerja	8	9	6	23
5	Delay proses pelayanan masih cukup tinggi	9	9	7	25
6	Kapasitas SDM terbatas	8	8	7	23
7	Kurangnya komitmen	8	7	7	22
8	Kurangnya integritas	7	8	7	22

3. Pengendalian Inflasi

Tabel 12. Identifikasi Masalah Pengendalian Inflasi Berdasarkan Model 7s McKinsey

Elemen Utama	Elemen Turunan	Identifikasi Masalah
1	2	3
Hard elements	Strategi	Belum adanya peta alur distribusi pangan
		Kecenderungan hanya merespon permasalahan
	Struktur	-
	Sistem	Belum adanya sistem informasi yang memberikan informasi harga secara real time
Belum tersedianya sistem informasi ketersediaan pangan yang real time		
Soft elements	Skill	-
	Staff	-
		-
	Style (gaya kepemimpinan)	-
Shared Value (nilai organisasi)	-	

PARAF KOORDINASI



Tabel 13. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Pengendalian Inflasi

No.	Masalah/Faktor penyebab	Banyak/ sering terjadi	Dapat diintervensi	Biaya rendah	Skala Potensi
1	2	3	4	5	6
1	Belum adanya peta alur distribusi pangan	7	7	8	22
2	Kecenderungan hanya merespon permasalahan	8	8	7	23
3	Belum adanya sistem informasi yang memberikan informasi harga secara real time	8	9	8	25
4	Belum tersedianya sistem informasi ketersediaan pangan yang real time	9	9	8	26

4. Penanganan Stunting

Tabel 14. Identifikasi Masalah Penanganan Stunting Berdasarkan Model 7s McKinsey

Elemen Utama	Elemen Turunan	Identifikasi Masalah
1	2	3
Hard elements	Strategi	Pelaksanaan masih bersifat instruktif normatif tanpa adanya inovasi mandiri
	Struktur	-
	Sistem	Lemahnya data Program tidak tepat sasaran
Soft elements	Skill	Penguasaan terhadap sistem informasi masih kurang
	Staff	Pengelola data belum tersedia
	Style (gaya kepemimpinan)	-
	Shared Value (nilai organisasi)	-

Tabel 15. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Penanganan Stunting

No.	Masalah/Faktor penyebab	Banyak/ sering terjadi	Dapat diintervensi	Biaya rendah	Skala Potensi
1	2	3	4	5	6
1	Belum adanya inovasi mandiri	8	8	7	23
2	Lemahnya sistem data	8	9	8	25
3	Ketidatepatan sasaran program	8	8	8	24

PARAF KOORDINASI

Y Y Ed

4	Lemahnya penguasaan sistem informasi pengelolaan data	9	8	7	24
5	Pengelola data yang terlatih belum tersedia	8	8	8	24

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tabel 16. Identifikasi Masalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Model 7s McKinsey

Elemen Utama	Elemen Turunan	Identifikasi Masalah
1	2	3
Hard elements	Strategi	Belum adanya sosialisasi yang masif kepada pelaku UMKM
	Struktur	Koordinasi antar OPD dan pelaku usaha yang terkait langsung masih cukup lemah
	Sistem	Tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem masih lemah
Soft elements	Skill	-
	Staff	Personil masih kurang
	Style (gaya kepemimpinan)	-
	Shared Value (nilai organisasi)	-

Tabel 17. Penetapan Skoring Tertinggi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

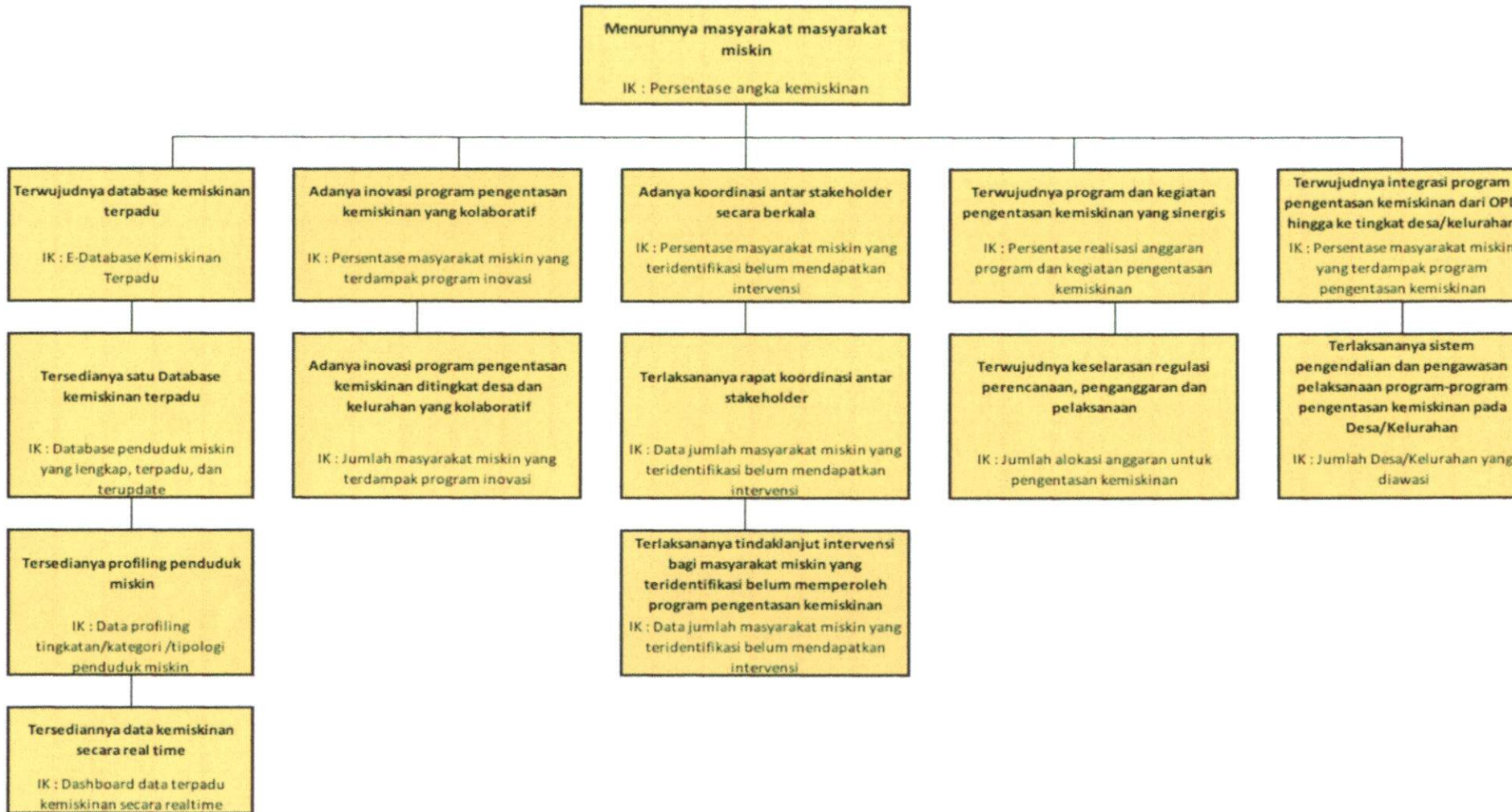
No.	Masalah/Faktor penyebab	Banyak/ sering terjadi	Dapat diintervensi	Biaya rendah	Skala Potensi
1	2	3	4	5	6
1	Belum adanya pemahaman para pelaku UMKM mengenai E-Tenedring, E-Purchasing dll	9	8	8	25
2	Belum adanya koordinasi yang intensif antara OPD dan pelaku usaha yang terkait	9	9	8	26
3	Lemahnya tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem masih lemah	9	8	8	25
4	Personil UKPBJ yang masih terbatas	8	9	9	26

Berdasarkan identifikasi masalah diatas menjadi dasar dalam penentuan *Logical Frame Work* setiap agenda RB Tematik yang akan dilaksanakan dan kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik. *Logical Frame Work* masing-masing sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

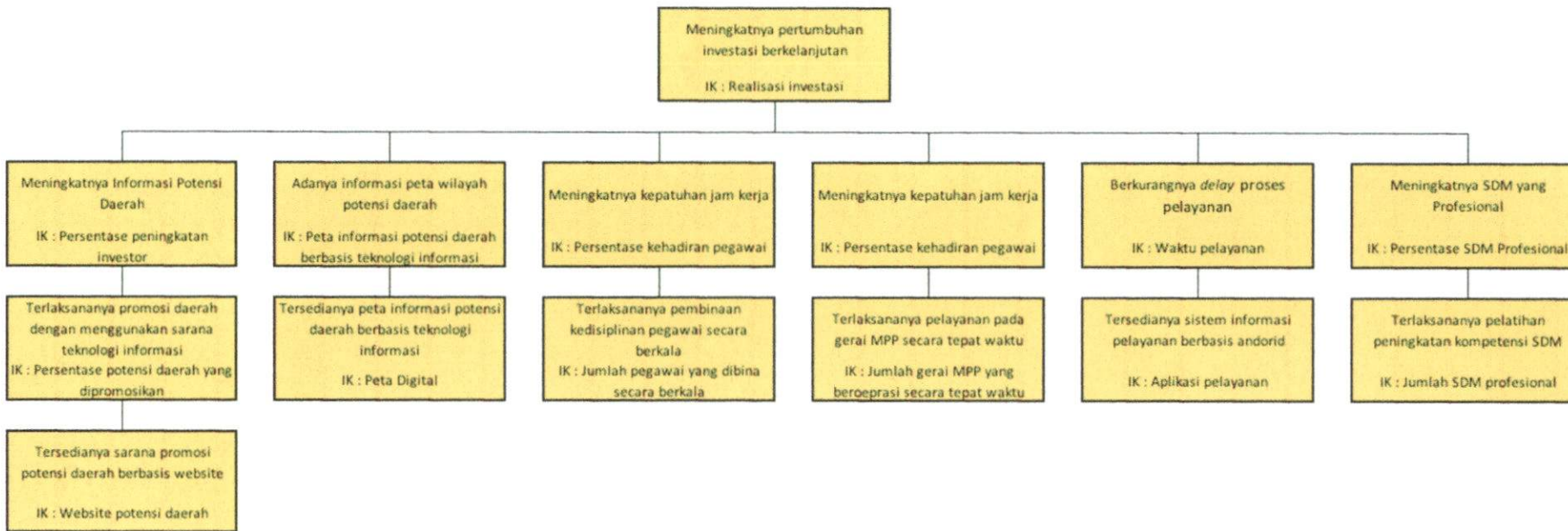
Bagan 1.
Logical Frame Work Penanggulangan Kemiskinan



PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

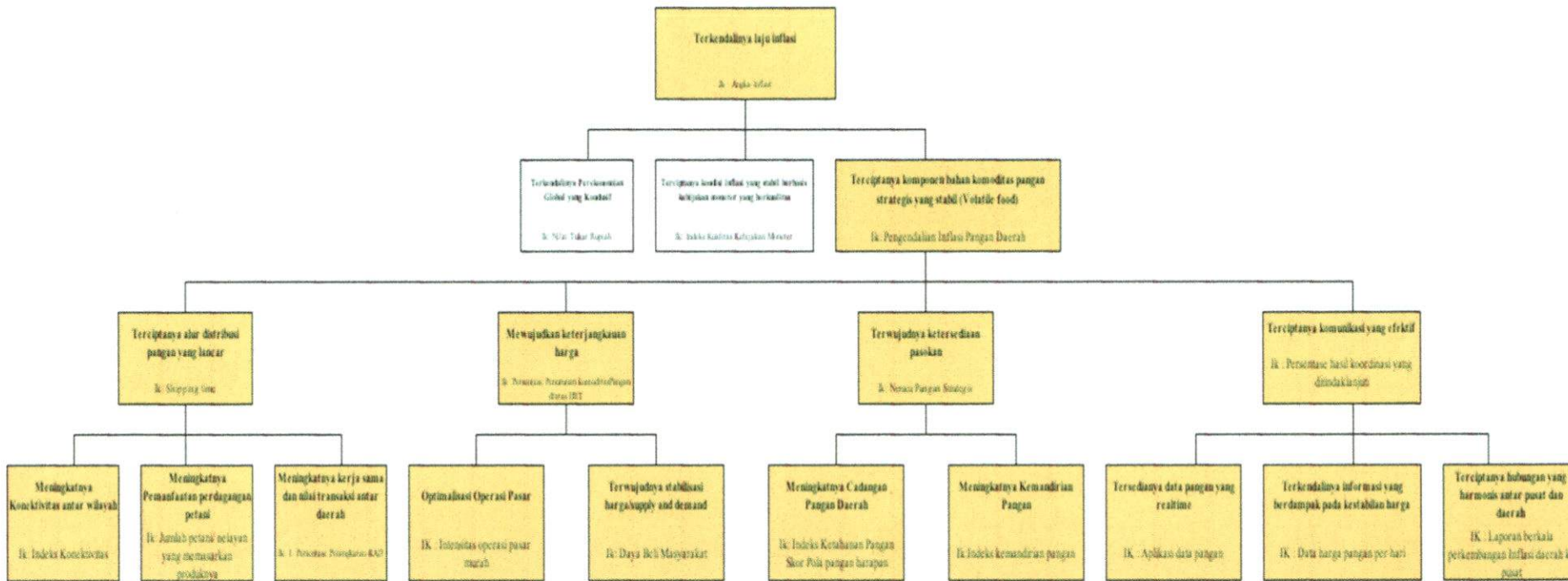
Bagan 2.
Logical Frame Work Peningkatan Invenstasi



PARAF KOORDINASI

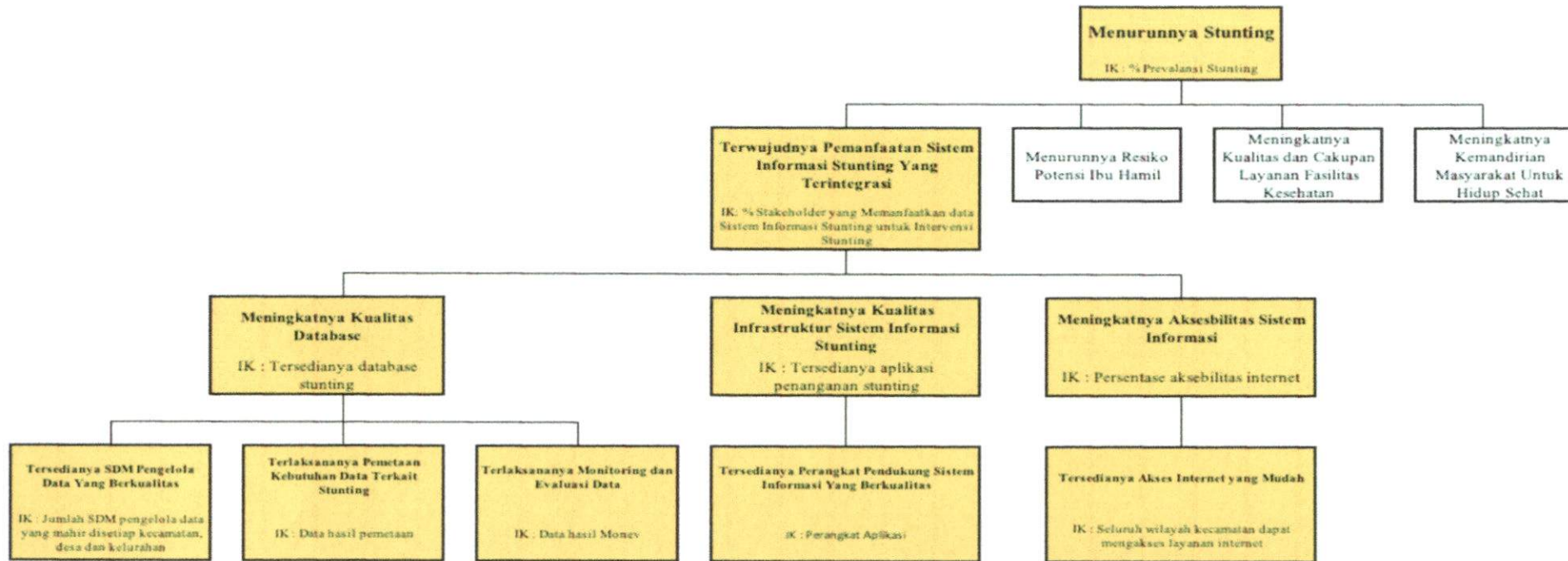
[Handwritten signature]

Bagan 3
 Logical Frame Work Pengendalian Inflasi



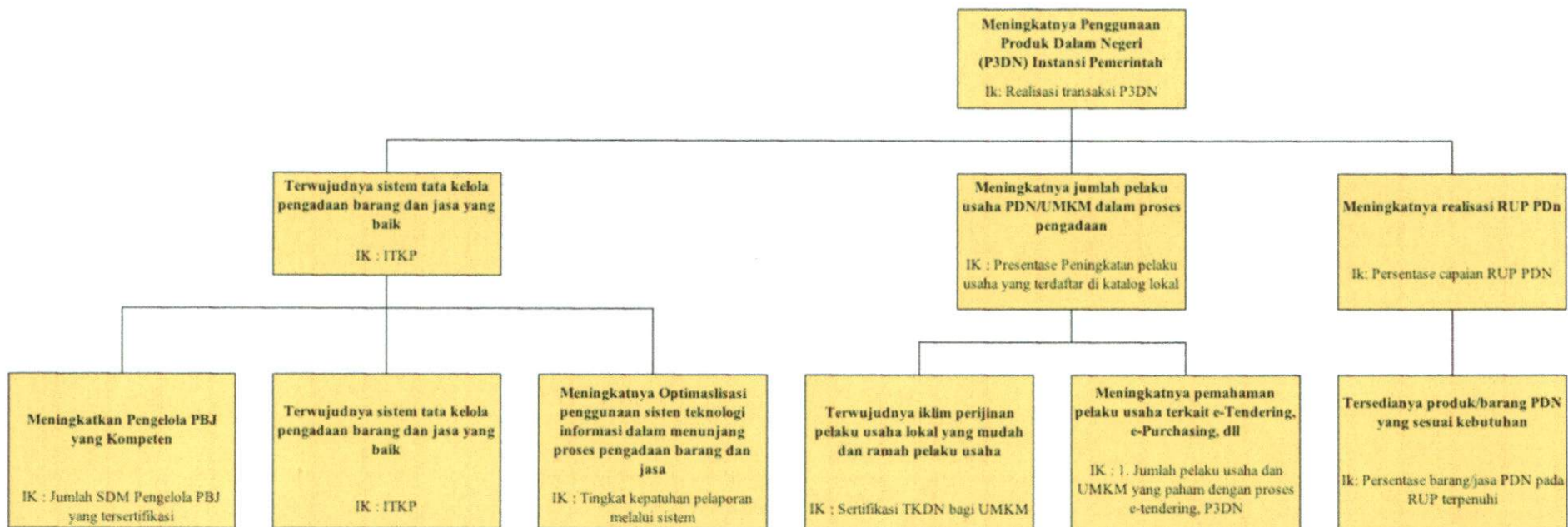
PARAF KOORDINASI
 [Handwritten signature]

Bagan 4.
Logical Frame Work Penanganan Stunting



PARAF KOORDINASI
N + [Signature]

Bagan 5.
Logical Frame Work Peningkatan Invenstasi



PARAF KOORDINASI
y t ad

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI KABUPATEN KONAWA

4.1 Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe

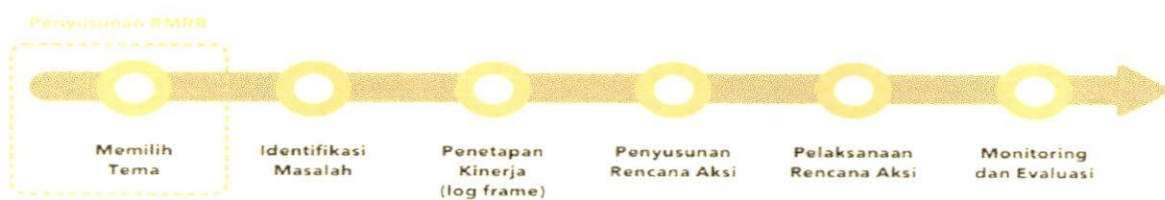
Dalam pelaksanaan *Road Map* RB Nasional 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kabupaten Konawe melakukan perubahan atas perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam dokumen perencanaan, untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Arah Kebijakan pembangunan RB di Kabupaten Konawe tergambar didalam skema berikut:

Gambar 2. Pembangunan RB di Kabupaten Konawe

Tahapan Pembangunan RB General




Tahapan Pembangunan RB Tematik



Pelaksanaan *Road Map* RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 akan berhasil jika seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki:

1. Komitmen;
2. Menyelesaikan akar masalah;
3. Kolaboratif;
4. Inovatif; dan
5. Mampu mengelola perubahan;

Berdasarkan prinsip diatas maka untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB, dilakukan pembenahan pengelola RB di lingkungan Kabupaten Konawe, dimana telah disusun Tim Pengelola Reformasi Birokrasi yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja (Pokja)

PARAF KOORDINASI


Pengampuh. Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam Pembangunan RB. Tim Pengelola RB Kabupaten Konawe dijelaskan sebagai berikut:

1. Tim Pengarah RB yakni Bupati Konawe
2. Ketua RB Kabupaten Konawe adalah Sekretaris Daerah
3. Sekretaris RB adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe.

4. Tim Pokja pengampuh RB General :

a) Tim Pokja Pengampu Kegiatan Utama 1

- 1) Koordinator
- 2) Sekretaris
- 3) Anggota

Mengelola kegiatan utama:

- 1) Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*.
- 2) Pelaksanaan Core Values ASN

b) Tim Pengampu Kegiatan Utama 2

- 1) Koordinator
- 2) Sekretaris
- 3) Anggota

Mengelola kegiatan utama:

- 1) Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN
- 2) Penataan Jabatan Fungsional
- 3) Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
- 4) Penguatan Manajemen Talenta ASN
- 5) Penguatan Sistem Merit

c) Tim Pengampu Kegiatan Utama 3

- 1) Koordinator
- 2) Sekretaris
- 3) Anggota

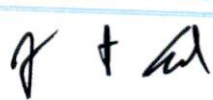
Mengelola kegiatan utama Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional

d) Tim Pengampu Kegiatan Utama 4

- 1) Koordinator
- 2) Sekretaris
- 3) Anggota

Mengelola kegiatan utama:

PARAF KOORDINASI



- 1) Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
 - 2) Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
 - 3) Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
- e) Tim Pengampu Kegiatan Utama 5
- 1) Koordinator
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota
- Mengelola kegiatan utama:
- 1) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
 - 2) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- f) Tim Pengampu Kegiatan Utama 6
- 1) Koordinator
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota
- Mengelola kegiatan utama:
- 1) Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
 - 2) Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
 - 3) Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
- g) Tim Pengampu Kegiatan Utama 7
- 1) Koordinator
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota
- Mengelola kegiatan utama:
- 1) Pelaksanaan Arsip Digital
5. Tim Pokja pengampuh RB Tematik :
- a) Tim Pokja Pengampu Tema 1
- 1) Koordinator
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota
- Mengelola kegiatan utama:
- 1) Penanggulangan kemiskinan
- b) Tim Pokja Pengampu Tema 2
- 1) Koordinator
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

Mengelola kegiatan utama:

1) Peningkatan investasi

c) Tim Pokja Pengampu Tema 3

1) Koordinator

2) Sekretaris

3) Anggota

Mengelola kegiatan utama:

1) Pengendalian inflasi

d) Tim Pokja Pengampu Tema 4

1) Koordinator

2) Sekretaris

3) Anggota

Mengelola kegiatan utama:

1) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

e) Tim Pokja Pengampu Tema 5

1) Koordinator

2) Sekretaris

3) Anggota


Mengelola kegiatan utama:

1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tim Reformasi Birokrasi bersifat *ad hoc* dan memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam *Road Map*, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB sesuai dengan kegiatan utama dan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk disampaikan kepada ketua Tim RB Kabupaten Kabupaten Konawe dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB sesuai target dan waktu yang direncanakan. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi

PARAF KOORDINASI


penting ketika pelaksanaan rencana aksi terlaksana sesuai yang diharapkan sehingga dapat dilakukan analisis dan rekomendasi untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang ada. Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RB Kabupaten Konawe dan dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

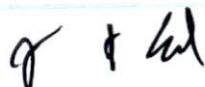
PARAF KOORDINASI
g + ed

BAB V **PENUTUP**

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dengan prima, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dengan mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, Kabupaten Konawe telah menyusun dan menetapkan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Pada akhirnya, penetapan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

PALAP KOORDINASI


RENCANA AKSI RB GENERAL

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2023	Output		Target Tahun 2023	Target Penyelesaian Tahun 2023						Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan kerja pelaksana	
					Indikator	Satuan		Januari-Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Tingkat implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	75%	1 Evaluasi Rekomendasi LHE SPBE	Hasil evaluasi terhadap rekomendasi LHE SPBE	Laporan	1							10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2 Bimtek Pendampingan Penyusunan Arsitektur SPBE (Domain Proses Bisnis, Domain Layanan, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi, Domain Infrastruktur dan Keamanan)	Kegiatan	Kegiatan	1						20.000.000	Semua OPD		
				3 Penginputan Arsitektur SPBE Kedalam aplikasi SIA SPBE Kemenpan-RB	Kegiatan	Kegiatan	1						5.000.000	Semua OPD		
				4 Penetapan Konawe oleh Pemerintah Daerah	Dokumen	Dokumen	1						10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi Layanan Digital	100%	1 Analisis layanan awal di MPP digital	Hasil analisis	Laporan	1							10.000.000	Dinas PTSP	Dinas PTSP
				2 Rakor teknis bersama OPD Layanan	Terlaksananya Rakor							15.000.000	Dinas PTSP			
				3 Penyusunan proses pengembangan desain aplikasi	Tersusunya Flow Chart Penggunaan Aplikasi	Dokumen	1					10.000.000	Dinas Kominfo			
				4 Pengembangan infrastruktur aplikasi	Aplikasi Layanan	Aplikasi	...					50.000.000				
				5 Integrasi layanan	Terintegrasinya layanan	Layanan	...					10.000.000				
				6 Pengujian keamanan dan performa aplikasi	Terlaksananya pengujian	Layanan	...					10.000.000				
				7 Implementasi MPP Digital	Terimplementasinya MPP Digital	Layanan	...					10.000.000	Dinas PTSP			
3	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	1 Pelatihan Admin aplikasi SPAN Lapor	Aktifnya aplikasi SPAN Lapor Pemda Konawe	Aplikasi	1							15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2 Mensosialisasikan penggunaan SPAN lapor ke OPD dan masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi ke OPD dan Masyarakat	Sosialisasi	2					20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika			
				3 Melakukan pemantauan SPAN Lapor	Terpantaunya laporan masyarakat	OPD	61					10.000.000	Semua OPD			
				4 Tindaklanjut laporan SPAN lapor	Terlaksananya tindak lanjut laporan oleh OPD	OPD	61					10.000.000	Semua OPD			
				5 Monev penyelesaian pengaduan SPAN lapor	Terlaksananya Monev atas tindaklanjut pada OPD	OPD	61					10.000.000	Semua OPD			
4	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	25%	1 Memetakan rekomendasi LHE Tingkat Digitalisasi Arsip ke ANRI	Laporan hasil pemetaan	Laporan	1							5.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				2 Tindaklanjut atas rekomendasi dari ANRI	Laporan hasil tindaklanjut	Laporan	1						10.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
				3 Penyusunan Klasifikasi Arsip, SKKAD, Pengajuan JRA, TND	Draft Dokumen	Dokumen	1						15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
				4 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh ANRI	Terbitnya persetujuan JRA oleh ANRI	Surat Persetujuan	1						15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
				5 Penyusunan dan Penetapan Perbup Tentang JRA, Tata Naskah Dinas, SKKAD, Klasifikasi Arsip	Ditetapkannya Peraturan Bupati	Perbup	1						20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
				6 Sosialisasi Perbup Tentang JRA, Tata Naskah Dinas, SKKAD, Klasifikasi Arsip	Terlaksananya sosialisasi	Keg.	1						20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip		

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

				7	Pendampingan penggunaan aplikasi SRIKANDI pada OPD	Terlaksananya pelatihan	OPD	32						25.000.000		Semua OPD
				8	Implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI pada OPD	Implementasi pada OPD	OPD	32						10.000.000		Semua OPD
				9	Monitoring dan Evaluasi dalam penerapan aplikasi SRIKANDI pada OPD	Monev Implementasi penerapan aplikasi SRIKANDI	OPD	32						5.000.000		Semua OPD
5	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	40	1	Memetakan rekomendasi LHE Indeks Tata Kelola Pengadaan	Laporan hasil pemetaan	Laporan	1						5.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian PBJ Setda
				2	Rumusan kerangka tindaklanjut atas rekomendasi dari LKPP	Rumusan hasil tindaklanjut	Laporan	1					5.000.000	Bagian PBJ Setda		
				3	Melakukan koordinasi ke OPD dengan melibatkan tenaga APIP (kunjungan langsung)	Terlaksananya tindaklanjut	OPD	61					10.000.000	Semua OPD		
				4	Pengajuan usul LKPP terkait pengisian jabatan fungsional PBJ	Surat usulan pengisian jabatan fungsional	Orang	8					20.000.000	Bagian PBJ Setda		
				5	Pelaksanaan ujian kompetensi level I	Terlaksananya ujian kompetensi	Orang	8					50.000.000	Bagian PBJ Setda		
				6	Pengajuan ke BKPSDM untuk pengangkatan Jafung	Pengangkatan Jafung	Orang	8					10.000.000	BKPSDM		
				7	Menyediakan bukti dukung untuk pemenuhan indikator-indikator penilaian	Bukti dukung	OPD	61					5.000.000	Bagian PBJ Setda		
				8	Monitoring dan Evaluasi untuk penguatan pengadaan barang dan jasa lingkup Pemda	Monev penguatan pengadaan barang dan jasa	OPD	61					10.000.000	Semua OPD		
6	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	1	Identifikasi jabatan struktural yang akan difungsionalkan	Jumlah jabatan fungsional yang diidentifikasi	Jafung	...						40.000.000	Bagian Organisasi Setda	Semua OPD
				2	Perumusan draft peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional	Draft peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional	Draft	1					10.000.000	Bagian Organisasi Setda		
				3	FGD dengan para pemangku kepentingan	Terlaksananya FGD	Keg.	1					20.000.000	Semua OPD		
				4	Finalisasi draft	Draft Final peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional	Draft	1					5.000.000	Bagian Organisasi Setda		
				5	Penetapan/pengelesaian peralihan jabatan struktural ke fungsional	Peraturan Bupati/SK peralihan jabatan struktural ke fungsional	Perbup/SK	1					25.000.000	Bagian Organisasi Setda		
7	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	1	Perencanaan kinerja	Jumlah OPD yang melakukan perencanaan kinerja	OPD	61						20.000.000	BKPSDM	Semua OPD
				2	Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja	Jumlah OPD yang dipantau dan dibina	OPD	61					50.000.000	Semua OPD		
				3	Evaluasi Penilaian kinerja	Jumlah OPD yang dievaluasi kinerjanya	OPD	61					50.000.000	Semua OPD		
				4	Tindaklanjut hasil evaluasi kinerja	Jumlah	OPD	61					10.000.000	Semua OPD		
				1	Koordinasi ke KASN mengenai perkembangan nilai Indeks Sistem Merit Kabupaten Konawe	Nilai Indeks Sistem Merit	Laporan	1					20.000.000		BKPSDM	
				2	Melakukan evaluasi pemetaan permasalahan terhadap perkembangan nilai Indeks Sistem Merit Kabupaten Konawe	Laporan hasil pemetaan	Laporan	1					5.000.000		BKPSDM	

PARAF KOORDINASI

(Handwritten signature)

8	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem merit	200	3	Perumusan strategi dalam menyelesaikan permasalahan sistem merit	Rumusan strategi	Laporan	1							5.000.000	BKPSDM	BKPSDM	
				4	Implementasi strategi pelaksanaan sistem merit	Implementasi tata kelola kebijakan publik pada OPD	OPD	61							20.000.000		Semua OPD	
				5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem merit	Monev implementasi tata kelola kebijakan publik	OPD	61							20.000.000		Semua OPD	
9	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Profesionalitas ASN	75	1	Koordinasi ke BKN mengenai perkembangan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Konawe	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Laporan	1							20.000.000	BKPSDM	BKPSDM	
				2	Melakukan evaluasi pemetaan permasalahan terhadap perkembangan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Konawe	Laporan hasil pemetaan	Laporan	1							5.000.000		BKPSDM	
				3	Perumusan strategi dalam menyelesaikan permasalahan	Rumusan strategi	Laporan	1							5.000.000		BKPSDM	
				4	Implementasi strategi pelaksanaan profesionalitas ASN	Implementasi profesionalitas kerja ASN OPD	OPD	61							20.000.000		Semua OPD	
				5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan profesionalitas ASN	Monev implementasi pelaksanaan profesionalitas ASN	OPD	61							20.000.000		Semua OPD	
		Indeks NSPK	50	1	Koordinasi ke BKN mengenai perkembangan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Konawe	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Laporan	1								10.000.000	BKPSDM	BKPSDM
				2	Melakukan evaluasi pemetaan permasalahan terhadap perkembangan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Konawe	Laporan hasil pemetaan	Laporan	1							5.000.000	BKPSDM		
				3	Perumusan strategi dalam menyelesaikan permasalahan	Rumusan strategi	Laporan	1							5.000.000	BKPSDM		
				4	Implementasi strategi pelaksanaan profesionalitas ASN	Implementasi profesionalitas kerja ASN OPD	OPD	61							20.000.000	Semua OPD		
				5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan profesionalitas ASN	Monev implementasi pelaksanaan profesionalitas ASN	OPD	61							20.000.000	Semua OPD		
10	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	3	1	Melakukan evaluasi pemetaan permasalahan terhadap perkembangan nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe	Laporan hasil pemetaan	Laporan	1							5.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	
				2	Perumusan strategi dalam menyelesaikan permasalahan	Rumusan strategi	Laporan	1							5.000.000		Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
				3	Implementasi strategi pelaksanaan perbaikan pelayanan publik	Terlaksananya perbaikan pelayanan publik	OPD	61							20.000.000		Semua OPD	
				4	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik	Monev implementasi pelaksanaan pelayanan publik	OPD	61							25.000.000		Semua OPD	

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PENGENTASAN KEMISKINAN**

No.	Permasalahan Tatakelola Pemerintah Program Penanggulangan Kemiskinan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2023	Output akhir yang dihasilkan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
1	Lemahnya sistem data sosial masyarakat	Terwujudnya data base kemiskinan	Tersedianya E-Data Base Kemiskinan	1 Aplikasi	1. Rekonasiliasi data penduduk miskin dan pemutakhiran data DTKS di masing-masing wilayah desa/kelurahan dengan data BPS dan data sektoral di masing-masing OPD terkait.	1. Database penduduk miskin yang lengkap, terpadu, dan terupdate	28 Data Base Kecamatan					50.000.000	Dinas Sosial	Bappeda, Dinas KB dan PP, Dinkes, BPS
					2. Melakukan profiling penduduk miskin di masing-masing Desa/Kelurahan	2. Data profiling tingkatan/kategori /tipologi penduduk miskin	28 Kecamatan					150.000.000	Dinas Sosial	Bappeda, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, Pemerintah Desa/Kelurahan
					3. Membangun dashboard yang menampilkan data terpadu kemiskinan secara realtime berbasis TI	3. Dashboard data terpadu kemiskinan secara realtime berbasis TI	1 Dashboard Data					30.000.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo, Bappeda, Dinkes, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, Pemerintah Desa/Kelurahan
2	Belum adanya inovasi program pengentasan kemiskinan	Terwujudnya inovasi program pengentasan kemiskinan	Persentase masyarakat miskin yang terdampak program inovasi	100%	1. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ditingkat desa dan kelurahan yang kolaboratif	1. Jumlah masyarakat miskin yang terdampak program inovasi	5000 Orang					9.000.000.000	Bappeda	Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinkes, Diknas, Dinas PU, Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas
3	Sinergi koordinasi antara OPD dan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang masih kurang	Terlaksananya koordinasi antar stakeholder	Persentase masyarakat miskin yang teridentifikasi belum mendapat intervensi	100%	1. Pelaksanaan Koordinasi antar stakeholder secara berkala	1. Jumlah masyarakat miskin yang teridentifikasi belum mendapat intervensi	500 Orang					900.000.000	Bappeda	Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, Pemerintah Desa/Kelurahan
					2. Tindaklanjut intervensi bagi masyarakat miskin yang teridentifikasi belum memperoleh program pengentasan kemiskinan	2. Jumlah masyarakat miskin yang ditindaklanjuti	5500 Orang					50.000.000	Bappeda	Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinkes, Diknas, Dinas PU, Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Koperindag
4	Belum dilakukan secara sinergis	Terwujudnya program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang sinergis	Persentase realisasi anggaran program dan kegiatan pengentasan kemiskinan	100%	1. Keselarasan regulasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1. Jumlah alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan	12 OPD					50.000.000	Bappeda	Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinkes, Diknas, Dinas PU, Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas
5	Integrasi kebijakan program hulu-hilir belum terkoordinasi dengan baik	Terwujudnya integrasi program Pengentasan Kemiskinan dari OPD hingga ke tingkat Desa/Kelurahan	Presentase masyarakat miskin yang terdampak program pengentasan kemiskinan	100%	1. Melakukan sistem pengendalian dan pengawasan program-program pengentasan kemiskinan	2. Jumlah desa/kelurahan yang diawasi	696 Desa/ Kelurahan					500.000.000	Inspektorat	Bappeda, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinkes, Diknas, Dinas PU, Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Koperindag, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PARAF KOORDINASI


**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
STUNTING**

No.	Permasalahan Stunting	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2023	Output akhir yang dihasilkan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
1	Lemahnya sistem data	Meningkatnya kualitas data base	Tersedianya data base stunting	1 Data base	1. Tersedianya SDM pengelola data yang berkualitas	Jumlah SDM pengelola data yang mahir disetiap kecamatan, desa dan kelurahan	348 Orang					300.000.000	Bappeda	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas kominfo, Dinas KB dan PP
					2. Terlaksananya pemetaan kebutuhan data terkait stunting	Data hasil pemetaan	348 Desa/ Kelurahan					50.000.000	Bappeda	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, BPS
					3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi data	Data hasil monev	348 Desa/ Kelurahan					150.000.000	Bappeda	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, BPS
2	Pengelolaan data yang terlatih belum tersedia	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sistem Informasi Stunting	Tersedianya aplikasi penanganan stunting	1 Aplikasi	Tersedianya Perangkat Pendukung Sistem Informasi Yang Berkualitas	Perangkat Aplikasi	1 Aplikasi					25.000.000	Dinas Kominfo	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, BPS
3	Lemahnya penguasaan sistem informasi Pengelolaan data	Meningkatnya Aksesibilitas Sistem Informasi	Persentase aksesibilitas informasi	100%	1. Terlaksananya pemetaan daerah-daerah yang memerlukan akses informasi	Seluruh wilayah kecamatan dapat mengakses layanan internet						150.000.000	Dinas Kominfo	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo Pemerintah Kecamatan, Dinas KB dan PP, BPS



**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PENGENTASAN KEMISKINAN**

No.	Permasalahan Pengelolaan / Pengembangan Atas Peningkatan Pertumbuhan Investasi Berkelanjutan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2023	Output akhir yang dihasilkan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
1	Promosi potensi daerah masih konvensional	Meningkatnya Informasi Potensi Daerah	Presentase Peningkatan Investor	100%	1. Pelaksanaan Promosi Daerah dengan menggunakan sarana teknologi Informasi 2. Tersedianya sarana promosi potensi daerah berbasis website	1. Persentase potensi daerah yang dipromosikan 2. Adanya Website potensi daerah	100% 1 Website					100.000.000 25.000.000	Dinas PTSP Dinas Kominfo	Dinas PTSP, Bagian Kerjasama Setda Konawe, Dinas KOMINFO Dinas PTSP
2	Belum adanya informasi peta wilayah potensi investasi	Tersedianya Peta Wilayah Informasi Berdasarkan Potensi Investasi	Peta informasi potensi daerah berbasis teknologi informasi	1 Peta Informasi	1. Membuat peta informasi potensi daerah berbasis teknologi informasi	1. Tersedianya peta informasi potensi daerah berbasis teknologi informasi	1 Peta					25.000.000	Dinas PTSP	Dinas PTSP, Bagian Kerjasama Setda Konawe, Dinas KOMINFO
3	Efisiensi Struktur pengelolaan Mall Pelayanan Publik	Meningkatnya kepatuhan pada Jam Kerja yang Telah di Tentukan	Persentase kehadiran pegawai	100%	1. Terlaksananya pelayanan pada gerai MPP secara tepat waktu	1. Jumlah gerai MPP yang beroperasi secara tepat waktu dan Efisien	12 Gerai					40.000.000	Dinas PTSP	Dinas PTSP, Bagian Kerjasama Setda Konawe, Dinas KOMINFO
4	Kepatuhan jam kerja	Meningkatnya kepatuhan pada Jam Kerja yang Telah di Tentukan	Persentase kehadiran pegawai	100%	1. Terlaksananya pembinaan kedisiplinan pegawai secara berkala	1. Jumlah pegawai yang dibina secara berkala	100 Pegawai					20.000.000	Dinas PTSP	Dinas PTSP, Bagian Kerjasama Setda Konawe, Dinas KOMINFO
5	Delay proses dalam pelayanan masih cukup tinggi	Berkurangnya Delay atau Keterlambatan dalam Proses Pelayanan	Waktu pelayanan	Pepat waktu	1. Tersedianya sistem informasi pelayanan berbasis andorid	1. Aplikasi pelayanan	1 Aplikasi					25.000.000	Dinas PTSP	Dinas PTSP, Bagian Kerjasama Setda Konawe, Dinas KOMINFO
6	Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas	Meningkatnya SDM yang Profesional	Persentase SDM yang Profesional	100%	1. Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi SDM	1. Jumlah SDM Profesional	25 Orang					100.000.000	Dinas PTSP	Dinas PTSP, Bagian Kerjasama Setda Konawe, Dinas KOMINFO

PARAF KOORDINASI

J. H. S.

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PENGENDALIAN INFLASI**

No.	Permasalahan Pengendalian Inflasi	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2023	Output akhir yang dihasilkan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
1	Belum adanya peta alur distribusi pangan	Terciptanya alur distribusi pangan yang lancar	Shipping time	Tepat waktu	1. Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	1. Indeks Konektivitas	100					10.000.000.000	Asisten perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Konawe	Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Konawe, Dinas Ketahanan pangan, Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas PU
					2. Meningkatnya Pemanfaatan perdagangan petani	2. Persentase petani/ nelayan yang memasarkan produknya	100%					100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas Peterenakan
					3. Meningkatnya kerja sama dan nilai transaksi antar daerah	3. Persentase Peningkatan KAD	100%					100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Bagian Ekonomi Setda, Bagian Kerjasama Setda
2	Kenaikan harga pangan	Mewujudkan keterjangkauan harga	Persentase Penurunan komoditas Pangan diatas HET	100%	1. Stabilisasi harga/supply and demand	1. Indeks Daya Beli Masyarakat	100					800.000.000	Asisten perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Konawe	Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Konawe, Dinas Ketahanan pangan, Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2. Optimalisasi Operasi Pasar	2. Intensitas operasi pasar murah	8 Kegiatan					400.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Bagian Ekonomi
3	Ketersediaan stok pangan	Terwujudnya ketersediaan pasokan	Neraca Pangan Strategis	100%	1. Meningkatnya Kemandirian Pangan	1. Indeks kemandirian pangan	100					500.000.000	Asisten perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Konawe	Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Konawe, Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2. Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah	2. Indeks Ketahanan Pangan Skor Pola pangan harapan	100					400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas Peterenakan
4	Belum tersedianya sistem informasi ketersediaan pangan yang real time	Terciptanya komunikasi yang efektif	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	1. Tersedianya data pangan yang realtime	1. Aplikasi data pangan	1 Aplikasi					25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Kominfo
					2. Terkendalinya informasi yang berdampak pada kestabilan harga	2. Data harga pangan per hari	12 Laporan					20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Konawe, Dinas Ketahanan pangan, BPS
					3. Terciptanya hubungan yang harmonis antar pusat dan daerah	3. Laporan berkala perkembangan Inflasi daerah ke pusat	12 Laporan					60.000.000	Asisten perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Konawe	Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Konawe, Dinas Ketahanan pangan, Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan

PARAF KOORDINASI


**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

No.	Permasalahan Dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2023	Output akhir yang dihasilkan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
1	Belum adanya pemahaman para pelaku UMKM mengenai E-Tendering, E-Purchasing dll	Meningkatnya jumlah pelaku usaha PDN/UMKM dalam proses pengadaan	Presentase Peningkatan pelaku usaha yang terdaftar di katalog lokal	100%	1. Pelaksanaan pembinaan ikdim perijinan pelaku usaha lokal yang mudah dan ramah pelaku usaha	1. Sertifikasi TKDN bagi UMKM	100 UMKM					50.000.000	Dinas Koperindag	Dmas Koperindag
					2. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait e-Tendering, e-Purchasing, dll	1. Persentase pelaku usaha dan UMKM yang paham dengan proses e-tendering, P3DN	100%				50.000.000	Dinas Koperindag	Dmas Koperindag	
2	Belum adanya koordinasi yang intensif antara OPD dan pelaku usaha yang terkait	Terwujudnya sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik	ITKP	75 Indeks	1. Meningkatkan Pengelola PBJ yang Kompeten	1. Persentase SDM Pengelola PBJ yang tersertifikasi	100%					150.000.000	Bagian PBJ	Bagian PBJ
					2. Terwujudnya sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik	2. ITKP	75 Indeks				100.000.000	Bagian PBJ	Bagian PBJ	
					3. Meningkatnya Optimalisasi penggunaan sisten teknologi informasi dalam menunjang proses pengadaan barang dan jasa	3. Tingkat kepatuhan pelaporan melalui sistem	61 OPD				100.000.000	Bagian PBJ	Bagian PBJ	
3	Tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem Pelaku Usaha yang masih lemah	Meningkatnya realisasi RUP PDN	Persentase capaian RUP PDN	100%	1. Tersedianya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan	1. Persentase barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi	100%					50.000.000	Bagian PBJ	Semua OPD

PARAF KOORDINASI
